

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN, SiLPA DAN KINERJA KEUANGAN
DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015-2016).”**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

ANDRIYANTO SETYO UTOMO

B200 140 183

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,
SiLPA DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2015-2016).**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

ANDRIYANTO SETYO UTOMO

B 200 140 183

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Dr. Fatchan Achyani, SE, M.Si)

NIDN: 0614086801

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,
SILPA DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2015-2016)."**

Oleh:

ANDRIYANTO SETYO UTOMO
B 200 140 183

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 07 Agustus 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

**1. Dr. Fatchan Achyani, SE, M.Si
(Ketua Dewan Penguji)**

(.....)

**2. Dr. Yuli T.C, M.M, Ak
(Anggota I Dewan Penguji)**

(.....)

**3. Dr. Zulfikar, SE, M.Si
(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)

Dekan,



Dr. Syamsudin, M.M)
INDN. 0017025701

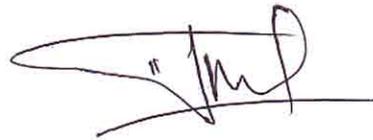
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 07 Agustus 2018

Penulis



ANDRIYANTO SETYO UTOMO

B200140183

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,
SiLPA DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015-2016).”**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Silpa dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal. Populasi dari penelitian ini adalah data dari laporan realisasi APBD seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2015-2016. Pengambilan sampel penelitian dengan purposive sampling dan didapatkan 29 kabupaten dan 6 kota, dengan 2 tahun amatan. Sehingga total sampel yang diteliti adalah 70. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji asumsi klasik dan kemudian dilakukan uji hipotesis dengan metode regresi linear berganda dengan PAD,DAU dan DBH berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sementara itu, DAK, SiLPA, rasio tingkat kemandirian dan rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Kata Kunci: Alokasi Belanja Modal, PAD, DAU, DAK, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas.

Abstract

The purpose of this study was to analyze influence of Local Own Revenue, Fiscal Balance Trasfer, Budget Financing Surplus and Regional Financial Effectiveness Level towards the Capital Expenditures. The population of this research is by using financial data from local governments Budget Realization Report in Central Java Province from 2015 to 2016. Research sampling used purposive sampling technique and found 29 regional and 6 cities, with 2 years of observation. So, the total sample studied was 70. The collected data was analyzed using classic assumption test and then do hypothesis test. Testing the hypotesis in this study using multiple regression analysis that Local Own Revenue, General Allocation Fund, and Revenue Sharing Fund level has positive influence and significant impact on capital expenditure. While, Special Allocation Fund, Budget Financing Surplus, Regional Financial Independence, and Regional Financial Effectiveness Level hasn't affect the capital expenditures.

Keywords: *Capital Expenditures Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Budget Financing Surplus, Regional Financial Independence, Regional Financial Effectiveness Level.*

1. PENDAHULUAN

Dikeluarkannya Undang-Undang No.22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-

Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi langkah awal dalam memulai otonomi daerah serta desentralisasi fiskal. Sehingga pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan (Janah et al 2017).

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap tersebut digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual. Pengukuran (proxy) yang digunakan adalah persentase perbandingan antara belanja modal dengan total belanja dan Skala yang digunakan adalah rasio (Pratama 2017). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Febriana 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi alokasi belanja modal. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin membaik. Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari pengelolaan APBD secara efektif dan efisien (wadira 2013).

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatankegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan kegiatan. UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan kepada publik sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal. Fungsi DAU sebagai pemerataan kapasitas fiskal (Darise, 2008).

Selain dari PAD dan transter dari pusat untuk membiayai kegiatannya, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pendanaan belanja modal.

Analisis rasio keuangan daerah terhadap anggaran pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Halim, 2008). Rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktifitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatannya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim, 2008).

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya PAD terhadap jumlah total pendapatan daerah, sehingga memunculkan permasalahan suatu daerah yang dikatakan mandiri dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik (Ardhini dan Handayani, 2011). Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah (Mahmudi, 2010).

Rasio Keuangan Efektivitas daerah dinilai dengan membandingkan jumlah realisasi PAD dan target PAD (dihitung berdasarkan alokasi PAD tahun bersangkutan), sehingga suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila jumlah realisasi pendapatan lebih tinggi daripada target yang ditetapkan Novianto dan

Hanafiah (2015) . Sehingga kemampuan dan efektivitas keuangan daerah dalam merealisasikan PAD akan memperlihatkan tingkat kemandirian daerah dalam mengelola potensi dan manajemen keuangan daerah Sugiyanto (2016)

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti terkait ada/tidaknya pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), tingkat kemandirian (TK) dan rasio efektivitas (RE) terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten/kota. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dengan kriteria Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dan telah diaudit oleh BPK-RI serta dapat diakses.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Silpa, Tingkat kemandiraian dan Rasio Efektivitas terhadap Alokasi Belanja Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah Periode 2015-2016. Sehingga dapat dideskripsikan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA, TE, RE dan ABM.
Descriptive Statistics

| Variabel | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|------------------------|----|-----------|------------|-------------|----------------|
| Alokasi Belanja Modal | 70 | 51980,70 | 1026716,90 | 354910,7271 | 175941,49201 |
| Pendapatan Asli Daerah | 70 | 152044,60 | 1491645,90 | 30005,0671 | 196981,42799 |
| Dana Alokasi Umum | 70 | 400176,80 | 1398539,70 | 929818,6871 | 244673,01363 |
| Dana Alokasi Khusus | 70 | 3750,10 | 483813,40 | 174673,0329 | 117588,89844 |
| Dana Bagi Hasil | 70 | 4606,70 | 240510 | 47390,6500 | 37726,99677 |

| | | | | | |
|---------------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| SiLPA | 70 | 43648,20 | 1194348,70 | 266486,0700 | 171738,82062 |
| Tingkat Kemandirian | 70 | ,10 | ,40 | ,1457 | ,07160 |
| Rasio Efektivitas | 70 | ,80 | 1,10 | ,9800 | ,05275 |
| Valid N (listwise) | 70 | | | | |

Hasil Statistik Alokasi Belanja Modal memiliki nilai rata-rata selama dua tahun sebesar 354910,7271, nilai tertinggi sebesar 1026716,90 pada kota Semarang pada tahun 2016, sedangkan nilai terendah sebesar 51980,70 pada Kabupaten Rembang pada tahun 2015, dan nilai standar deviasi sebesar 175941,49201. Hasil Statistik Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata selama dua tahun sebesar 30005,0671, nilai tertinggi sebesar 152044,60 pada kota Semarang pada tahun 2016, sedangkan nilai terendah sebesar 5152044,60 pada Kota Pekalongan pada tahun 2015 dan nilai standar deviasi sebesar 196981,42799.

Hasil Statistik Dana Alokasi Umum memiliki nilai rata-rata selama dua tahun sebesar 929818,6871, nilai tertinggi sebesar 1398539,70 pada kota Semarang pada tahun 2016, sedangkan nilai terendah sebesar 400176,80 pada Kota Salatiga pada tahun 2015 dan nilai standar deviasi sebesar 244673,01363. Hasil Statistik Dana Alokasi Khusus memiliki nilai rata-rata selama dua tahun sebesar 174673,0329, nilai tertinggi sebesar 483813,40 pada Kabupaten Cilacap pada tahun 2016, sedangkan nilai terendah sebesar 3750,10 pada Kota Surakarta pada tahun 2015, dan nilai standar tahun sebesar 117588,89844.

Hasil Statistik Dana Bagi Hasil memiliki nilai rata-rata selama dua tahun sebesar 47390,6500, nilai tertinggi sebesar 240510,00 pada Kudus pada tahun 2016, sedangkan nilai terendah sebesar 4606,70 pada Grobogan pada tahun 2015, dan nilai standar deviasi sebesar 37726,99677. Hasil Statistik SiLPA memiliki nilai rata-rata selama dua tahun sebesar 266486,0700, nilai tertinggi sebesar 1194348,70 pada Kota Semarang pada tahun 2015, sedangkan nilai terendah sebesar 43648,20 pada Kabupaten Blora pada tahun 2016, dan standar deviasi sebesar 171738,82062. Hasil Statistik Tingkat Kemandirian memiliki nilai rata-rata selama dua tahun sebesar 0,1457, nilai tertinggi sebesar ,40 pada Kota Semarang pada tahun 2015, sedangkan nilai terendah sebesar 0,10 pada Kabupaten Klaten pada tahun 2016, dan nilai standar deviasi sebesar 0,07160.

Hasil Statistik Rasio Efektivitas memiliki nilai rata-rata selama dua tahun sebesar 0,9800, nilai tertinggi sebesar 1,10 pada Kota Semarang pada tahun 2015, sedangkan nilai terendah sebesar 0,80 pada Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015, dan nilai standar deviasi sebesar 0,05275.

3.1.2 Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

| Variabel | p-value | Ketentuan | Kesimpulan |
|--------------------------------|---------|-----------|------------------------|
| <i>Unstandardized Residual</i> | 0,254 | > 0,05 | Distribusi data normal |

Berdasarkan pada tabel 2 bahwa variabel *unstandardized residual* memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan bahwa distribusi data normal. Uji aukorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson*.

3.1.3 Uji Autokorelasi

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

| <i>Durbin-Watson</i> | Ketentuan | Kesimpulan |
|----------------------|----------------|----------------------------|
| 1,324 | $-2 < DW < +2$ | Tidak terjadi autokorelasi |

Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,324 dimana berada diantara -2 sampai +2 sehingga persamaan model regresi dalam penelitian ini bebas dari permasalahan autokorelasi. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dengan melihat besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), indikasi apabila *tolerance* < 0,10 dan nilai VIF > 10.

3.1.4 Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | Tolerance | VIF | Kesimpulan |
|------------------------|-----------|-------|-------------------------|
| Pendapatan asli daerah | 0,144 | 6,963 | Bebas multikolinearitas |
| Dana alokasi umum | 0,240 | 4,164 | Bebas multikolinearitas |
| Dana alokasi khusus | 0,390 | 2,564 | Bebas multikolinearitas |

| | | | |
|---------------------|-------|-------|-------------------------|
| Dana Bagi Hasil | 0,662 | 1,511 | Bebas multikolinearitas |
| SiLPA | 0,277 | 3,606 | Bebas multikolinearitas |
| Tingkat Kemandirian | 0,235 | 4,249 | Bebas multikolinearitas |
| Rasio Efektivitas | 0,715 | 1,399 | Bebas multikolinearitas |

Berdasarkan tabel 4 bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* >0,10 dan nilai VIF <10, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.

3.1.5 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas

| Variabel | p-value | Ketentuan | Kesimpulan |
|------------------------|---------|-----------|---------------------------|
| Pendapatan asli daerah | 0,380 | >0,05 | Bebas heteroskedastisitas |
| Dana alokasi umum | 0,762 | >0,05 | Bebas heteroskedastisitas |
| Dana alokasi khusus | 0,273 | >0,05 | Bebas heteroskedastisitas |
| Dana Bagi Hasil | 0,158 | >0,05 | Bebas heteroskedastisitas |
| SiLPA | 0,211 | >0,05 | Bebas heteroskedastisitas |
| Tingkat Kemandirian | 0,358 | >0,05 | Bebas heteroskedastisitas |
| Rasio Efektivitas | 0,092 | >0,05 | Bebas heteroskedastisitas |

Berdasarkan tabel 5 bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi.

3.1.6 Hasil Uji Regresi Berganda

Tabel 6
Hasil Analisis Koefisien Regresi Berganda

| Variabel | B | t _{hitung} | Sig. |
|-------------------------|-------------|---------------------|-------|
| Konstanta | 95449,380 | 0,308 | 0,759 |
| Pendapatan asli daerah | 0,480 | 3,015 | 0,004 |
| Dana alokasi umum | 0,202 | 2,034 | 0,046 |
| Dana alokasi khusus | 0,239 | 1,478 | 0,145 |
| Dana Bagi Hasil | 1,601 | 4,134 | 0,000 |
| SiLPA | -0,219 | -1,668 | 0,100 |
| Tingkat Kemandirian | -145617,957 | -0,425 | 0,672 |
| Rasio efektivitas | -112416,110 | -0,422 | 0,675 |
| R ² | 0,717 | | |
| Adjusted R ² | 0,685 | | |
| F _{hitung} | 22,429 | | |
| Sig | 0,000 | | |

Berdasarkan tabel 6 diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$ABM = 95449,380 + 0,480PAD + 0,202DAU + 0,239DAK + 1,601DBH - 0,219SiLPA - 145617,957TK - 112416,110RE + \epsilon$$

Interprestasi dari persamaan diatas adalah sebagai berikut : Nilai konstanta untuk persamaan regresi adalah 95449,380. Hal ini menunjukkan bahwa jika pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), tingkat kemandirian (TK) dan rasio efektivitas (RE) dianggap konstan maka besarnya alokasi belanja modal sebesar 15,125.

3.1.7 Uji F

Pengujian signifikansi simultan dalam model regresi ini digunakan untuk menguji apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji F

| Nilai F _{hitung} | Nilai F _{tabel} | Sig. |
|---------------------------|--------------------------|-------|
| 22,429 | 2,16 | 0.000 |

Berdasarkan output di atas, diperoleh nilai Fhitung lebih besar dari F tabel (22,429 > 2,16). Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil ini juga didukung dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen (PAD,DAU,DAK,DBH,SiLPA,TK dan RE) secara simultan berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota periode 2015-2016.

3.1.8 Uji T

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis

| | T _{hitung} | T _{tabel} | Sig. | Keterangan |
|------------------------|---------------------|--------------------|-------|------------|
| Pendapatan asli daerah | 3,015 | 1,998 | 0,004 | Diterima |
| Dana alokasi umum | 2,034 | 1,998 | 0,046 | Diterima |
| Dana alokasi khusus | 1,478 | 1,998 | 0,145 | Ditolak |
| Dana Bagi Hasil | 4,134 | 1,998 | 0,000 | Diterima |
| SiLPA | -1,668 | 1,998 | 0,100 | Ditolak |

| | | | | |
|---------------------|--------|-------|-------|---------|
| Tingkat Kemandirian | -0,425 | 1,998 | 0,672 | Ditolak |
| Rasio efektivitas | -0,422 | 1,998 | 0,675 | Ditolak |

- a. Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai t hitung sebesar 3,015 dan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
- b. Variabel Dana Alokasi Umum mempunyai t hitung sebesar 2,034 dan nilai signifikansi sebesar $0,046 < 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_2 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
- c. Variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai t hitung sebesar 1,478 dan nilai signifikansi sebesar $0,145 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_3 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
- d. Variabel Dana Bagi Hasil mempunyai t hitung sebesar 4,134 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_4 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
- e. Variabel Sisa Lebih Pembiayaan anggaran mempunyai t hitung sebesar -1,668 dan nilai signifikansi sebesar $0,100 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_5 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
- f. Variabel Tingkat Kemandirian mempunyai t hitung sebesar -0,425 dan nilai signifikansi sebesar $0,672 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_6 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kemandirian tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
- g. Variabel Rasio Efektivitas mempunyai t hitung sebesar -0,422 dan nilai signifikansi sebesar $0,675 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_7 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.

Hipotesis (H_1) Berdasarkan hasil pengujian secara parsial untuk variabel pendapatan asli daerah diperoleh thitung sebesar $3,015 > t_{tabel}$ sebesar $1,998$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,004 < \text{batas signifikansi}$ sebesar $0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. sebab semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, bukan dari bantuan pemerintah pusat/provinsi, maka daerah dapat dikatakan mandiri secara keuangan dan daerah tersebut semakin leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Pendapatan asli daerah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga tercipta daerah yang mandiri. Hasil penelitian ini sesuai dan konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianto (2015), Afkarina (2017), Pratama (2016), Janah dkk (2017), Febriana (2015), Paramartha dan Budiasih (2016), Sudarwadi (2015), yang membuktikan adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal.

3.2.2 Pengaruh Dana alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal.

Hipotesis (H_2) Berdasarkan hasil pengujian secara parsial untuk variabel dana alokasi umum diperoleh thitung sebesar $2,034 > t_{tabel}$ sebesar $1,998$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,046 < \text{batas signifikansi}$ sebesar $0,05$, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima.

Kebutuhan dana alokasi umum oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan fiscal gap, yaitu ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah fiskal yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan dana alokasi umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada daerah sudah dimanfaatkan untuk sektor-sektor produktif yang dapat memberikan kontribusi

yang besar kepada pendapatan asli daerah, serta lebih digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan spekulatif, oleh sebab itu dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianto (2015), Afkarina (2017), Janah dkk (2017), Sudarwadi (2015), Wadira (2013), menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

3.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal.

Hipotesis (**H₃**) Berdasarkan hasil pengujian secara parsial untuk variabel dana alokasi khusus diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $1,478 < 1,998$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,145 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_3 ditolak.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal terbukti secara statistik. Dana alokasi khusus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Semakin besar transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka belanja modal semakin tinggi. Penerimaan dana alokasi khusus yang besar disebabkan kemampuan pembiayaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah masih rendah. Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarwadi (2015), Febriana (2015) dan Sari, dkk (2017) yang membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

3.2.4 Pengaruh Dana Bagi hasil terhadap Alokasi Belanja Modal.

Hipotesis (**H₄**) Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel dana bagi hasil diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $4,134 > 1,998$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Hal tersebut berarti dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal terbukti secara statistik.

Dana bagi hasil merupakan pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana

pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan presentase tertentu yang dihasilkan atas daerah penghasilan. Penerimaan DBH pajak bersumber dari pajak penghasilan sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari Kehutanan, Pertambangan Umum, dll. Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianto dan Hanafiah (2015), Janah, dkk (2017), menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

3.2.5 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal.

Hipotesis (H_5) Berdasarkan hasil pengujian secara parsial untuk variabel silpa diperoleh t_{hitung} sebesar $-1,668 < t_{tabel}$ sebesar $-1,998$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,100 >$ batas signifikansi sebesar $0,05$, maka H_0 diterima dan H_5 ditolak. Hal tersebut berarti sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal terbukti secara statistik.

Berdasarkan hasil analisis, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan praktek yang dilakukan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, untuk membelanjakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam bentuk belanja pengeluaran pembelian atau pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afkaria (2017), dan Febriana (2015) Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

3.2.6 Pengaruh Tingkat Kemandirian terhadap Alokasi Belanja Modal.

Hipotesis (H_6) Berdasarkan hasil pengujian secara parsial untuk variabel tingkat kemandirian diperoleh t_{hitung} sebesar $-0,425 >$ t_{tabel} sebesar $-1,998$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,672 >$ batas signifikansi sebesar $0,05$, maka H_0 ditolak dan H_6 ditolak. Hal tersebut berarti tingkat kemandirian tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal terbukti secara statistik.

Tingkat Kemandirian tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan Tingkat

Kemandirian tidak mempengaruhi keputusan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan atau menurunkan alokasi belanja modal. Tingkat kemandirian keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianto dan Hanafiah (2015), Sugiyanto (2016) yang membuktikan tidak adanya pengaruh tingkat kemandirian terhadap alokasi belanja modal.

3.2.7 Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Alokasi Belanja Modal.

Hipotesis (**H₇**) Berdasarkan hasil pengujian secara parsial untuk variabel belanja modal diperoleh t_{hitung} sebesar $-0,422 < t_{tabel}$ sebesar $-1,982$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,475 > \text{batas signifikansi}$ sebesar $0,05$, maka H_0 diterima dan H_7 ditolak. Hal tersebut berarti belanja modal tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal terbukti secara statistik.

Rasio efektivitas tidak mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil ini membuktikan bahwa kondisi yang terjadi kemungkinan disebabkan oleh tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat cenderung diabaikan maka pengalokasian belanja modal terealisasi dengan efektif dan dapat menghambat pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik. Sementara dana pada anggaran daerah yang pada dasarnya merupakan dana publik sebagian besar dibelanjakan untuk belanja pegawai, sehingga pemerintah perlu meningkatkan reservasi dan identifikasi ulang terhadap jumlah kebutuhan alokasi dana dari seluruh kegiatan secara lebih akurat dan detail sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik. Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Martini dan Dwirandra (2015) yang membuktikan tidak adanya pengaruh rasio efektivitas terhadap alokasi belanja modal.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Periode 2015-2016.
- b. Dana Alokasi Umum terbukti berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Periode 2015-2016.
- c. Dana Alokasi Khusus terbukti tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Periode 2015-2016.
- d. Dana Bagi Hasil terbukti berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Periode 2015-2016.
- e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terbukti tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Periode 2015-2016.
- f. Tingkat kemandirian terbukti tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Periode 2015-2016.
- g. Rasio Efektivitas terbukti tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Periode 2015-2016.
- h. Secara simultan seluruh variable Independen (PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA, TK dan RE) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal (ABM) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Periode 2015-2016.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup data dan kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara statistik dan informasi tertulis tentang APBD pada tahun 2015-2016.
- b. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih banyak menggunakan variabel independen dalam penelitian dan untuk menggunakan variabel moderating sebagai bagian dari interaksi yang diduga mampu menjelaskan secara maksimal variasi terhadap variabel dependen.

- c. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan data sekunder dari laporan realisasi APBD, tetapi juga melalui metode observasi atau pengamatan terhadap obyek secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rona. 2015. “ *Pengaruh Sisa Anggaran Pendapatan, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal*”. Iqtishadia, Vol. 7, No.1.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014-2016. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Febriana, S. I. 2015. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 4(9): 1-22.
- Halim, Abdul. 2008. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- <http://www.keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/23-dau-pegang-peranan-penting-untuk-pembangunan-daerah>
- Jannah, dkk. 2017. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasi Belanja Modal*”. Warta Ekonomi VOL. 07 NO 17
- Novianto, dan Hanafiah. 2015. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*”. Jurnal Ekonomi, Volume 4, No. 1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Paramartha, dan Budiasih, 2016. “*Analisis Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal*”. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 15, No. 2
- Wandira. 2013.” *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Anggaran Belanja Modal*”. (studi Empiris pada Pemerintah Provinsi seIndonesia Periode 2008-2010). Diponegoro Jurnal of Accounting.
- www.djpk.depkeu.go.id